



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI
DENGAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI DAN MENTERI PARIWISATA RI
(BIDANG PERINDUSTRIAN, UMKM, EKONOMI KREATIF, PARIWISATA, DAN
SARANA PUBLIKASI)**

Rapat Ke	:	6
Tahun Sidang	:	2025
Masa Sidang	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VII DPR RI
Hari, Tanggal	:	Rabu, 03 September 2025
Pukul	:	10.05 – 13.40 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA. (Ketua Komisi VII DPR-RI / F. PAN)
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, SE. M.Si. / Kabagset Komisi VII DPR-RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Acara	:	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA 2026.
Hadir	:	Anggota Komisi VII DPR-RI: 24 orang dari 40 Anggota Komisi VII DPR-RI/8 Fraksi. Hadir Pemerintah: 1. Menteri Perindustrian RI (Agus Gumiwang Kartasasmita); 2. Wakil Menteri Perindustrian RI (Faisol Riza) dan jajaran; 3. Menteri Pariwisata RI (Widiyanti Putri Wardhana); 4. Wakil Menteri Pariwisata RI (Ni Luh Enik Ermawati/Ni Luh Puspa) dan jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian RI dan Menteri Pariwisata RI, pada pukul 10.05 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada hari Rabu, 03 September 2025, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA., (F.PAN).

II. KESIMPULAN

1. Komisi VII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Perindustrian RI dan Menteri Pariwisata RI mengenai:
 - a. Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian RI TA 2026 sebesar Rp2.501.796.683.000,- (*dua triliun lima ratus satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) yang mengalami penambahan sebesar Rp564.917.964.000,- (*lima ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah*) dari Pagu Indikatif sebesar Rp1.936.878.719.000,- (*satu triliun sembilan ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah*), dengan alokasi berdasarkan unit kerja sebagai berikut:

No	Unit Kerja Kementerian Perindustrian RI	Pagu Anggaran TA 2026 (Ribuan Rp)
1	Sekretariat Jenderal	290.190.655
2	Ditjen Industri Agro	98.554.635
3	Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	103.357.589
4	Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	107.204.306
5	Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	238.980.338
6	Inspektorat Jenderal	42.005.662
7	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	745.659.566
8	Ditjen Ketahanan, Perwilayah, dan Akses Industri Internasional	181.091.448
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	694.752.484
	TOTAL	2.501.796.683

- b. Pagu Anggaran Kementerian Pariwisata RI TA 2026 sebesar Rp1.851.694.285.000,- (*satu triliun delapan ratus lima puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) yang mengalami penambahan sebesar Rp925.606.405.000,- (*sembilan ratus dua puluh lima miliar enam ratus enam juta empat ratus lima ribu rupiah*) dari Pagu Indikatif sebesar Rp926.087.880.000,- (*sembilan ratus dua puluh enam miliar delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*), dengan alokasi berdasarkan unit kerja sebagai berikut:

No	Unit Kerja Kementerian Pariwisata RI	Pagu Anggaran TA 2026 (Ribuan Rp)
1	Deputi Bid. Sumber Daya dan Kelembagaan	50.000.000
2	Deputi Bid. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	61.000.000
3	Deputi Bid. Industri dan Investasi	40.000.000
4	Deputi Bid. Pemasaran	300.000.000
5	Deputi Bid. Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	200.000.000
6	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	498.344.484
7	Politeknik Pariwisata	606.307.164
8	Badan Otorita	96.042.637
	Jumlah	1.851.694.285

2. Komisi VII DPR RI menyetujui:

- a. Usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian RI TA 2026 sebesar Rp1.464.839.278.000,- (*satu triliun empat ratus enam puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) yang akan dialokasikan untuk membiayai 222 kegiatan strategis yang berdampak pada pertumbuhan industri nasional, dengan rincian berdasarkan unit kerja sebagai berikut:

No	Unit Kerja Kementerian Perindustrian RI	Usulan Tambahan Anggaran TA 2026 (Ribuan Rp)
1	Sekretariat Jenderal	127.346.165
2	Ditjen Industri Agro	70.050.000
3	Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	93.000.000
4	Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	67.501.164
5	Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	249.475.602
6	Inspektorat Jenderal	1.600.000
7	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	298.350.000
8	Ditjen Ketahanan, Perwilayah, dan Akses Industri Internasional	242.750.000
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	314.766.347
	TOTAL	1.464.839.278

- b. Usulan tambahan anggaran Kementerian Pariwisata RI TA 2026 sebesar Rp1.891.754.122.000,- (*satu triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah*) yang akan dialokasikan untuk program peningkatan pariwisata nasional, dengan rincian berdasarkan unit kerja sebagai berikut:

No	Unit Kerja Kementerian Pariwisata RI	Usulan Tambahan Anggaran TA 2026 (Ribuan Rp)
1	Deputi Bid. Sumber Daya dan Kelembagaan	180.091.816
2	Deputi Bid. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	298.836.713
3	Deputi Bid. Industri dan Investasi	148.254.078
4	Deputi Bid. Pemasaran	640.014.823
5	Deputi Bid. Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	343.050.000
6	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	199.713.144
7	Politeknik Pariwisata	72.790.178
8	Badan Otorita	9.003.370
	Jumlah	1.891.754.122

3. Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Perindustrian RI dan/atau Kementerian Pariwisata RI untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI, antara lain:
- Meningkatkan alokasi anggaran untuk bidang pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.
 - Merencanakan pembangunan Politeknik Pariwisata, seperti di Sumatera Utara khususnya di Tapanuli Bagian Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Papua Barat Daya, dan provinsi lainnya guna meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata.
 - Memastikan program hilirisasi industri diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 - Memrioritaskan IKM untuk menjadi mitra dalam program hilirisasi industri.
 - Mengupayakan pendirian lembaga perlindungan industri sebagai upaya melindungi dan meningkatkan daya saing industri nasional.
 - Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk meningkatkan infrastruktur kepariwisataan terutama di bidang fasilitas yang terkait dengan kebersihan.
 - Memrioritaskan alokasi anggaran untuk peningkatan promosi kepariwisataan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada Pukul 13.40 WIB.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI,

T.T.D

**PIMPINAN KOMISI VII DPR-RI
KETUA RAPAT,**

T.T.D

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

**Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY,
M.Ag., M.Hum., MA.**

MENTERI PARIWISATA RI,

T.T.D

WIDYANTI PUTRI WARDHANA